

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia memasuki era modern yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya, salah satunya teknologi dibidang informasi. Semakin berkembangnya teknologi informasi saat ini memacu suatu penyampaian informasi yang lebih cepat, tepat, mudah dan akurat. Penggunaan komputer terutama dalam sistem informasi merupakan alat bantu yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, instansi maupun Industri. Penggunaan perangkat komputer sebagai perangkat pendukung manajemen dan pengolahan data adalah sangat tepat dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas data, dengan demikian penggunaan perangkat komputer dalam setiap informasi sangat mendukung sistem pengambilan keputusan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah dokumen yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara. Belanja negara sebagai salah satu unsur yang ada dalam struktur APBN, merupakan kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah dan dana desa. Dalam penjelasan pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa klasifikasi belanja negara terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Belanja perjalanan dinas merupakan salah satu contoh dari belanja negara yang rutin. Belanja ini termasuk dalam belanja barang sub belanja barang nonoperasional. Belanja perjalanan dinas adalah berbagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka perjalanan dinas sehubungan dengan tugas dan fungsi.

Perjalanan dinas dalam hal ini adalah perjalanan dinas dalam negeri, yaitu perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintahan, perjalanan dinas merupakan salah satu bagian yang penting dan tak terpisahkan, sehingga anggaran belanja negara ini bersifat produktif dan prioritas dalam penggunaannya. Diperlukan berbagai bentuk pengendalian dalam pembayaran biaya perjalanan dinas, agar belanja ini dapat tepat sasaran dan berdaya guna tinggi. Sebuah sistem sudah seharusnya ada untuk menjaga agar pembayaran biaya perjalanan dinas ini memenuhi prinsip-prinsip pemberian perjalanan dinas, mengatur pengeluaran belanja ini tetap dalam koridor pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan pemerintahan.

Pengembangan sistem informasi yang dapat mendukung dalam proses pembayaran biaya perjalanan dinas ini penulis tujukan pada salah satu instansi pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi para pegawai di kantor tersebut, penulis melihat bahwa dengan frekuensi pelayanan yang tinggi, akan banyak kegiatan dan atau pelaksanaan tugas yang membutuhkan perjalanan dinas yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat. Sehingga diperlukan pengendalian yang ketat agar pelaksanaan tugas dengan biaya perjalanan dinas menjadi berdaya guna dan berhasil guna.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat merupakan instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam aktifitasnya perjalanan dinas menjadi hal utama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi instansi ini, sehingga membuat laporan perjalanan dinas menjadi hal utama sekaligus kendala karena pengelolaan data perjalanan dinas masih dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Ms-Word* dan *Ms-Excel*, sehingga di dalam menghasilkan seluruh laporan masih

belum akurat dan relatif lama. Data-data yang berhubungan dengan perjalanan dinas di Dinas Lingkungan Hidup yang terhimpun itu, tentu saja sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam pencarian informasi dan laporan bagi pegawai. Sehingga dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat diandalkan untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat dalam mengambil keputusan manajemen baik rutin maupun strategis

Berdasarkan hasil observasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat yang peneliti lakukan diperoleh hasil bahwa pada saat ini pengelolaan data administrasi yang dilakukan masih kurang efektif. Bendahara masih menggunakan pengelolaan data administrasi secara manual yakni semua dokumen penting yang mendukung perjalanan dinas hanya tersip dalam lembaran kertas sehingga di nilai kurang efektif dan efisien. Hal ini dinilai kurang efektif karena pengelolaan data administrasi semua dokumen penting bisa saja hilang, dan rusak karena suatu hal yang tidak diinginkan. Selain itu pembuatan secara manual laporan perjalanan dinas juga dinilai kurang efisien dan lambat, karena masih dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Ms-Word* dan *Ms-Excel*. Belum adanya sistem informasi pembuatan laporan perjalanan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat mengakibatkan pemborosan waktu dan biaya akibat dari sistem yang tidak memiliki fitur-fitur dan fungsionalitas yang bermanfaat dan sesuai. Sistem informasi yang dibuat harus efektif dan sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada penelitian ini penulis membangun sistem perancangan yang akan diimplementasikan dalam penelitian berikut **“Pengembangan Sistem Informasi Penerbitan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat dengan Metode Fast”** karena penggunaan dan cara aksesnya yang begitu mudah sehingga sangat efektif untuk membantu mengelola suatu data administrasi perjalanan dinas untuk menunjang kelancaran pembuatan laporan perjalan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana mengembangkan Sistem Informasi Penerbitan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat?
- b. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Penerbitan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat?
- c. Bagaimana memenuhi kebutuhan informasi untuk mengoptimalkan kerja bendahara dalam pengelolaan dokumen perjalanan dinas?

## 1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah yang akan dikajikan dalam pembangunan "Sistem Informasi Penerbitan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat", yaitu sebagai Berikut:

- a. Perancangan Sistem Penerbitan ini hanya membahas mengenai Proses Pendataan Surat tugas, pembuatan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, Pembuatan Kwitansi SPJ Perjalanan Dinas, dan Pembuatan Laporan Perjalanan Dinas.
- b. Pengguna Sistem Informasi hanya dapat dilakukan oleh Bendahara.

## 1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulisan ini diharapkan dapat membantu mengoptimalkan kerja Bendahara di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat dalam pengelolaan dokumen perjalanan dinas, memperbaiki sistem yang ada dengan harapan pengolahan data administrasi perjalanan dinas yang selama ini dilakukan secara manual dapat dipermudah dengan dibuatnya rancangan sistem yang terkomputerisasi.

Dengan adanya sistem komputerisasi ini, maka diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan sebagai berikut :

- a. Sistem Informasi Penerbitan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan data administrasi perjalanan dinas agar dapat dikontrol dengan baik.
- b. Sistem Informasi Penerbitan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat ini dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya yang dapat dikembangkan kembali nantinya.c.
- c. Mempermudah pengelolaan dokumen perjalanan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat.
- d. Mempermudah dalam pembuatan surat pertanggungjawaban perjalanan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan laporan ini, pembahasan dan penganalisaannya diklasifikasikan secara sistematis ke dalam 5 (lima) bab yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam tahap ini atau bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang, Rumusan masalah, Batasan Masalah, Tujuan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini penulis menerangkan teori-teori yang digunakan sebagai panduan yang mendasari pengembangan Sistem Informasi Penerbitan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat dimana terdapat kutipan dari buku-buku, sumber inertent yang meliputi dari jurnal

penelitian terpublikasi maupun makalah dan sumber referensi lainnya yang mendukung penyusunan skripsi.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas mengenai model apa yang digunakan dan tahapan-tahapan apa saja yang digunakan dalam proses penelitian sistem.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan perencanaan dalam pengembangan suatu sistem penerbitan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di instansi untuk mendapatkan suatu kemudahan dalam pelayanan dan pembuatan laporan. Dalam bab ini ada beberapa uraian yaitu: Proses Bisnis, Activity Diagram, Analisa Masukan, Analisa Keluaran, Identifikasi kebutuhan, Use Case Diagram, Deskripsi Use Case, ERD ( Entity Relationship Diagram), Transformasi ERD ke LRS, LRS (logical Record Structure),Tabel,Spesifikasi Basis Data,Class Diagram, Sequence Diagram, Deployment Diagram, Rancangan Layar dan Tampilan Layar.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari apa yang telah penulis lakukan dalam menulis Laporan Skripsi ini, serta memberikan saran-saran terhadap analisa dan perancangan yang dibuat agar tetap bermanfaat dan bisa digunakan seutuhnya dalam proses penerbitan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat.